



# Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah

Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2025-2026  
(24 April - 13 Mei 2026)





# REDAKSI

## *PENASIHAT*

*Komjen. Pol. H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.*  
*Dr. Lalu Niqman Zahir, S.Sos., M.Si*  
*Oni Choiruddin S.H., M.H.*  
*Dr. Sri Sundari, SH., MM., CGCAE*

## *PENANGGUNG JAWAB*

*Dr. Syulfah Sari Dewi Syam, S.E., M.M*  
*Dr. Rahmat Hollyson Maiza, M.AP*

## *PIMPINAN REDAKSI*

*Marthen S. Rundupadang, S.H., M.H.*  
*Dra. Mediana Pongsitanan, S.H., M.H.*  
*Andika Prima Sari, S.IP., M.Si*

## *REDAKTUR PELAKSANA*

*Novi Alvisah Yusammi, S.E., M.M.*

## *STAF REDAKSI*

*Arie Aat Hartadi, S.E., M.A.*  
*Khalizzad Khalis, S.M.B., M.Tr.AP.*  
*Nanda Puspita, S.E., M.A.*  
*Nunung Ariyani, S.E., M.A.*  
*Rosdiana Rizal, S.H., M.A.*  
*Khusni Tamrin. S.Sos.*  
*Rindang Mustikawati, S.E.*  
*Moh.Yusuf, S.H.*  
*Edrida Pulungan, S.E., M.H.I., M.Si.E*  
*Irma Artanastiti, S.H.*  
*Mardyana Malawat, S.H.*  
*Didin Darmawan, S.Kom.*  
*Tunki Rachman Sanusi, S.H.*  
*Zyat Intan Delimasari, S.E.*  
*Haviva Amalia N.P, S.Pd.*



*Muhammad Irza, S.H.*  
*Yenny Anggraeni, S.Sos*  
*Iwuk Anggertina*  
*Ajeng Putri Ayu W, S.I.P.*  
*Diana Septaviana, S.H., M.H*  
*Ryanti Ramadani, S.Kom.*  
*Rama Dhesriyan, S.I.P.*  
*Rahmadiansyah, S.I.P.*

## *TATA LETAK DAN DESIGN*

*Aida Fitris Ahmalia, S.I.P.*  
*Lita Vieryna, S.Kom.*



# ASPIRASI MASYARAKAT & DAERAH

## SUMBER LEGITIMASI PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KONSTITUSIONAL DPD RI

### Anggota DPD RI

Berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. **(Pasal 258 poin h UU MD3)**

Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya. **(Pasal 258 poin i UU MD3)**

### DPD RI

DPD wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi. **(Pasal 237 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib)**

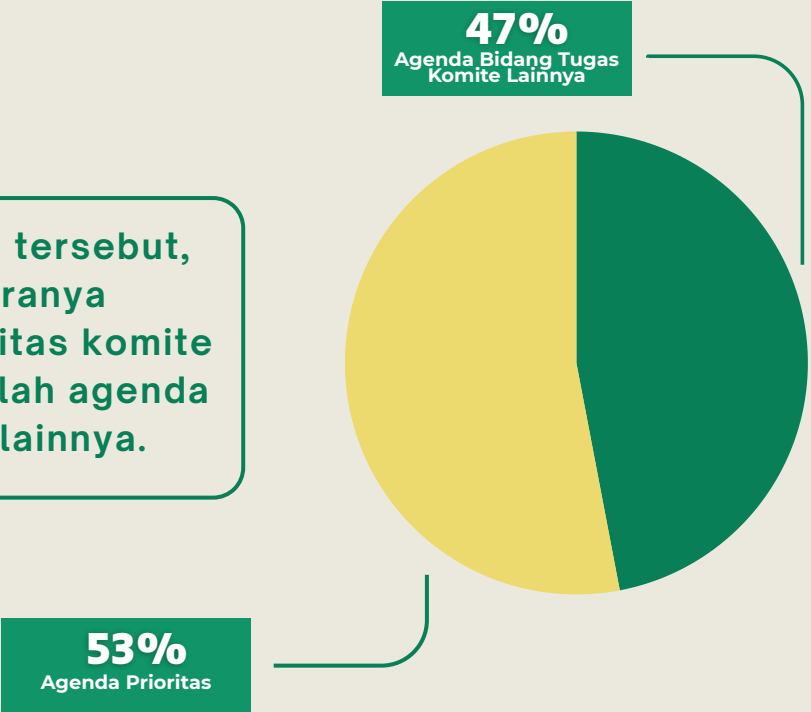
DPD wajib memperjuangkan program yang menjadi aspirasi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat daerah. **(Pasal 237 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib)**



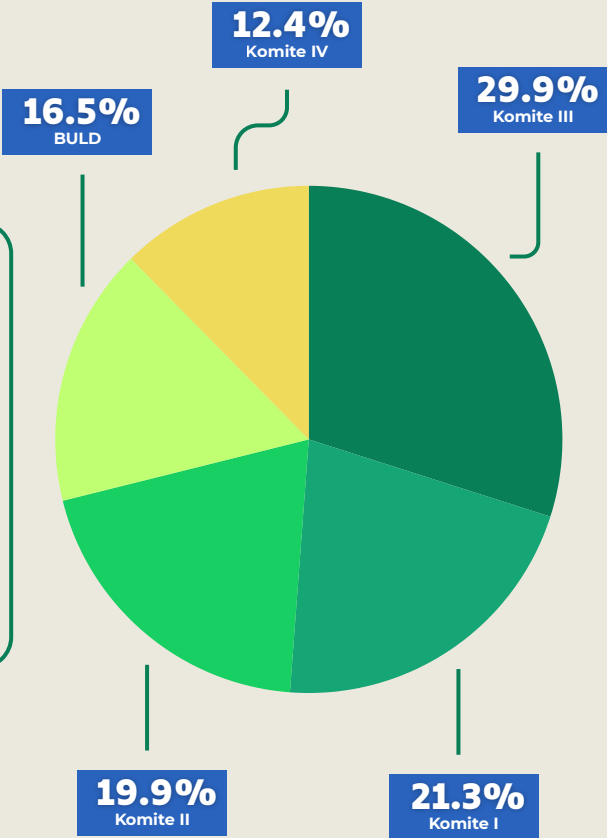
# TOTAL ASPIRASI PADA MASA RESES DI MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2025-2026

Telah diserap adalah sebanyak **2547** aspirasi

Dari total aspirasi 2547 tersebut, 1350 aspirasi diantaranya merupakan agenda prioritas komite sedangkan 1197 nya adalah agenda bidang tugas komite lainnya.



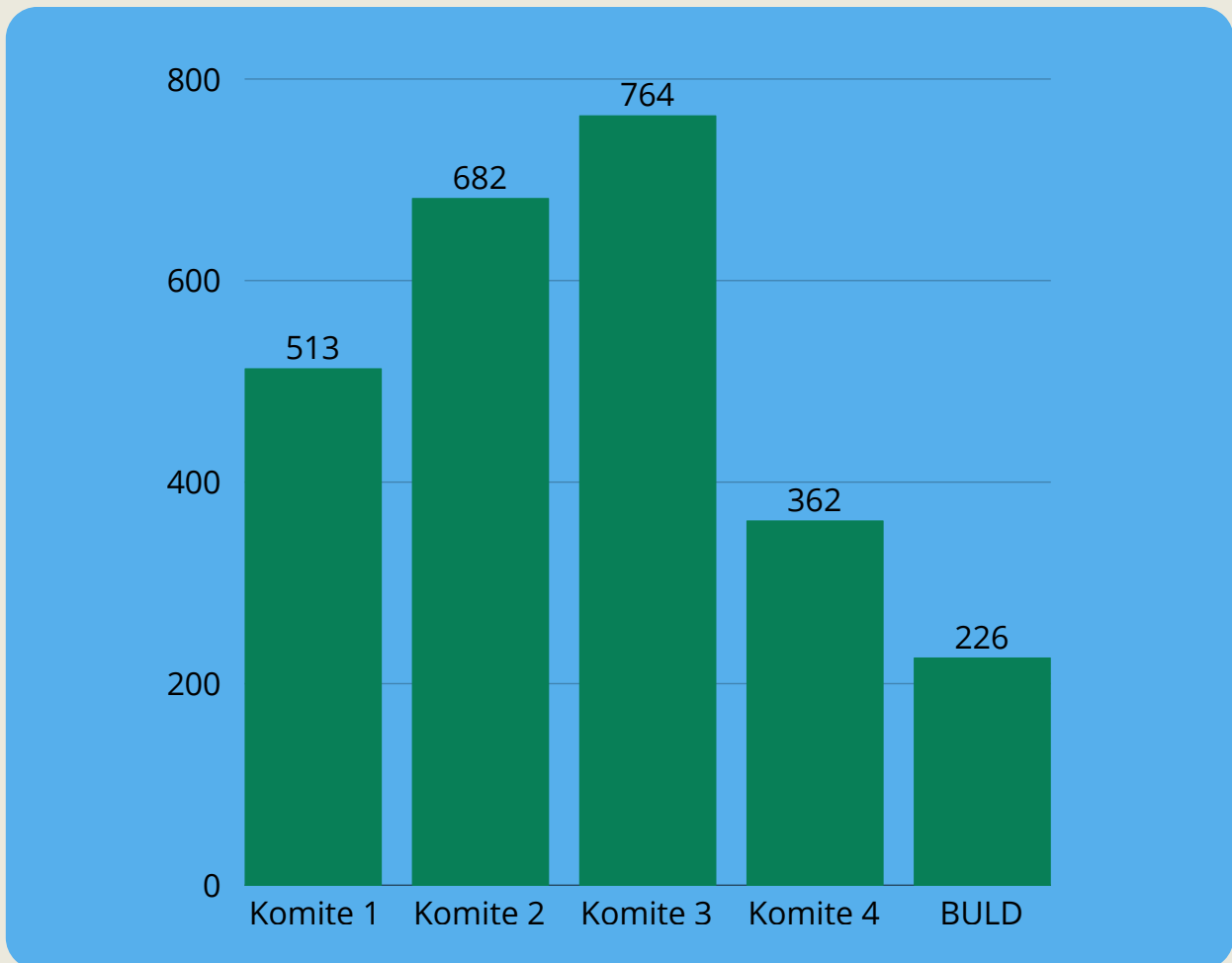
Dari 1350 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite, jumlah terbesar merupakan aspirasi aspirasi Komite III 404 aspirasi, Komite I sebanyak 287 aspirasi Komite II 269 aspirasi, disusul BULD sebesar 223 aspirasi, dan Komite IV sebesar 167 aspirasi.





*Dari Total Aspirasi  
Sebesar*

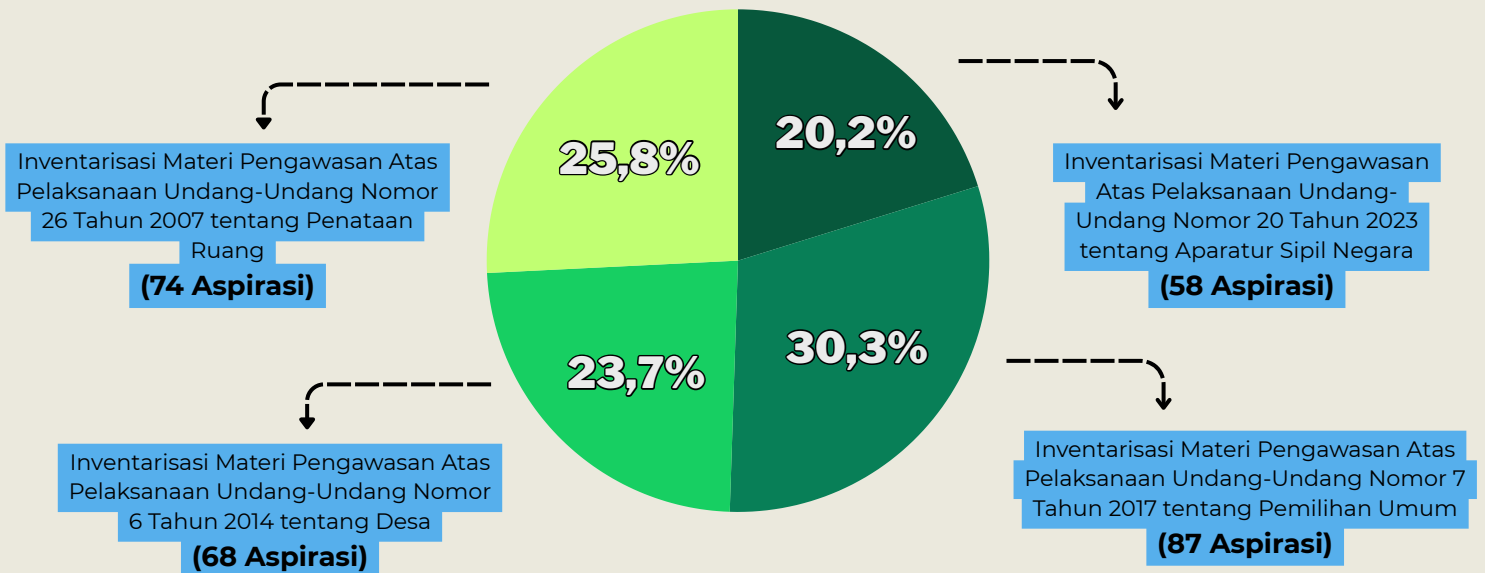
**2547**



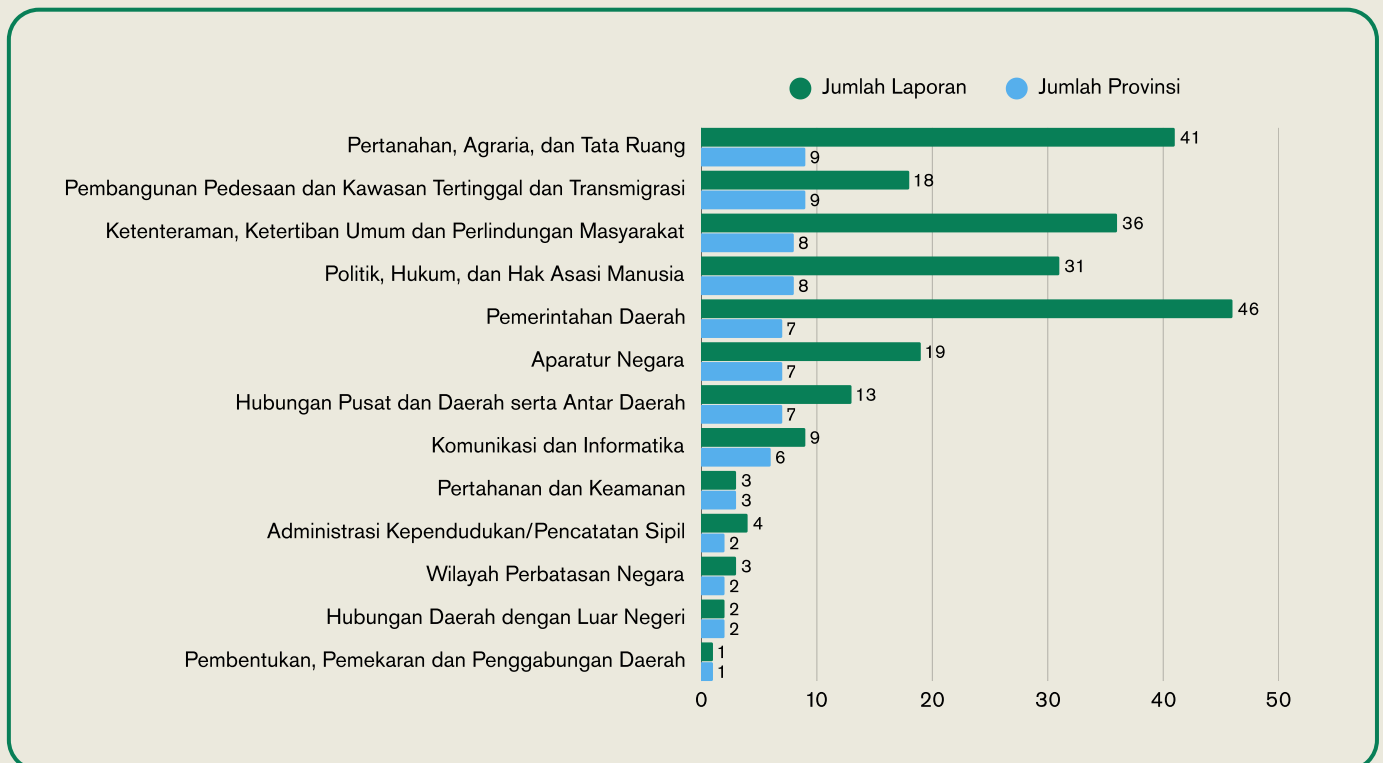
Dari total 2547 aspirasi, jumlah terbesar merupakan aspirasi Komite III 764 aspirasi, Komite II sebanyak 682 aspirasi, Komite I 513 aspirasi, Komite IV sebesar 362 aspirasi, dan BULD sebesar 226.

# ASPIRASI KOMITE I

## Prosentase Aspirasi Berdasarkan Tema Agenda



## Jumlah Provinsi dan Jumlah Aspirasi Berdasarkan Bidang Tugas Lainnya



# ISU STRATEGIS BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS

1

## Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara



- Belum tersedianya aturan pelaksana UU ASN mengenai skema paruh waktu mengakibatkan munculnya aspirasi daerah yang mendesak kepastian hukum transisi pegawai non - ASN
- Adanya penyesuaian jam kerja dalam skema PPPK paruh waktu berdampak pada belum terstandarisasinya kriteria kelayakan kesejahteraan serta perlindungan hak keuangan dasar pegawai.
- Kewajiban penataan tenaga non- ASN menjadi PPPK dalam skala besar menimbulkan keterbatasan ruang fiskal akibat lonjakan beban anggaran belanja pegawai pada APBD.

2

## Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- Konflik tumpang tindih peruntukan lahan antara kawasan industri, permukiman warga, dan kawasan hutan lindung di berbagai daerah.
- Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan perumahan dan industri yang tidak terkendali di wilayah pinggiran kota.
- Minimnya ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan yang jauh dari ambang batas minimum 30% sebagaimana diamanatkan UU Penataan Ruang.





# ISU STRATEGIS BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS

3

## Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



- Rendahnya partisipasi pemilih di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) akibat keterbatasan akses dan infrastruktur pemilu.
- Maraknya praktik politik uang (money politics) yang merusak integritas proses pemilihan umum di tingkat daerah.
- Ketidakakuratan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berulang terjadi di setiap siklus pemilu.

4

## Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Tata kelola pemerintahan desa, kapasitas aparatur desa, serta pengelolaan Dana Desa masih belum optimal
- Intervensi program dan regulasi dari pemerintah pusat dinilai terlalu membatasi fleksibilitas desa dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat lokal
- Pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal masih belum berjalan optimal akibat keterbatasan infrastruktur, akses permodalan, pemasaran, dan penguatan kelembagaan ekonomi desa





# BIDANG TUGAS LAINNYA KOMITE I



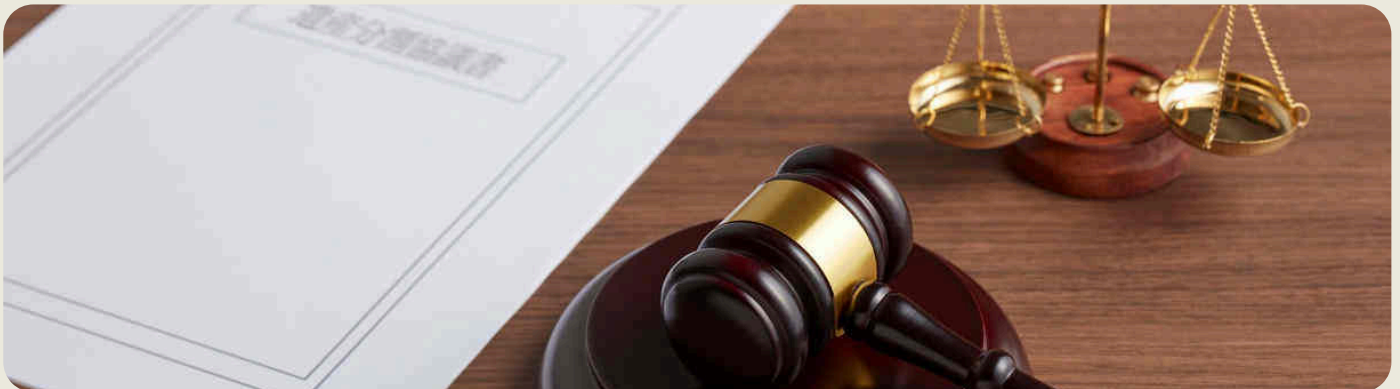
## Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang

- Tingginya konflik agraria dan lemahnya kepastian hukum atas tanah masyarakat/adat terkait sengketa, legalitas, dan batas wilayah.
- Lemahnya pengawasan tata ruang dan maraknya alih fungsi lahan yang melanggar RTRW serta mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
- Belum optimalnya tata kelola administrasi pertanahan dan aset desa, yang diperparah oleh lambatnya perizinan serta minimnya pelibatan masyarakat.



## Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal dan Trasmigrasi

- Terbatasnya akses jalan, listrik, air bersih, internet, pendidikan, dan kesehatan di desa serta kawasan tertinggal.
- Lemahnya kapasitas aparatur, transparansi, partisipasi masyarakat, serta pengawasan dalam pengelolaan anggaran desa.
- Terhambatnya pengembangan UMKM lokal akibat minimnya lapangan kerja, serta sulitnya akses modal dan pemasaran.



## Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Maraknya konflik sosial, peredaran narkoba, dan kriminalitas lingkungan yang menuntut peningkatan perlindungan aparat keamanan.
- Kurangnya kesiapsiagaan desa, minimnya fasilitas keselamatan, serta rentannya masyarakat terhadap kondisi darurat di daerah rawan.
- Kurangnya fasilitas keamanan (seperti penerangan) dan minimnya koordinasi dalam menindak aktivitas yang mengganggu ketertiban umum di kawasan permukiman.



## Politik, Hukum dan HAM

- Lemahnya kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan
- Penguatan penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat: Desakan publik untuk mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat dan UU Perampasan Aset, serta komitmen penuh dalam pemberantasan korupsi.
- Peningkatan pelayanan publik dan penguatan kelembagaan: Berfokus pada solusi over kapasitas lapas, pengawasan aktivitas usaha, serta penguatan wewenang DPD RI guna memperkuat integrasi dan ketahanan nasional di lingkungan masyarakat.



# BIDANG TUGAS LAINNYA KOMITE I



## Pemerintahan Daerah

- Belum optimalnya pembangunan dan pelayanan publik daerah.
- Membutuhkan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan literasi digital, pemberdayaan UMKM, serta penguatan ketahanan pangan dan sosial-keagamaan.
- Perbaiki tata kelola pembangunan dan kelembagaan. Berfokus pada sinkronisasi program pusat-daerah, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pemenuhan sarana sosial-keagamaan dan penataan kawasan yang berkelanjutan.



## Aparatur Negara

- Keterbatasan anggaran untuk rekrutmen dan gaji PPPK, lemahnya pengawasan netralitas, serta belum optimalnya sistem karier berbasis kompetensi.
- Peningkatan kesejahteraan pendidik, pendidikan karakter, serta perlindungan anak dan generasi muda dari kekerasan maupun penyimpangan sosial.
- Kesejahteraan purnawirawan dan peningkatan layanan publik terkait penanganan masalah keamanan lingkungan dan efisiensi pelayanan publik.



## Hubungan Pusat dan Daerah Serta Antar Daerah

- Masih didominasi oleh wewenang pemerintah pusat, terutama dalam urusan perizinan dan pengelolaan sektor strategis daerah.
- Tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat yang menghambat optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
- Menjadi tantangan utama dalam efektivitas pengelolaan program pembangunan serta validasi data penerima bantuan.



## Komunikasi dan Informatika

- Maraknya penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan pinjaman online ilegal yang menuntut penguatan perlindungan data serta literasi digital masyarakat.
- Keterbatasan akses internet dan komunikasi yang menjadi kendala mengoptimalkan pelayanan publik dan pengembangan ekonomi lokal berbasis digital di sejumlah wilayah.
- Perlu terus didorong bagi generasi muda agar perkembangan digitalisasi tetap selaras dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.



# BIDANG TUGAS LAINNYA KOMITE I



## Administrasi Kependudukan/ Pencatatan Sipil

- Pengelolaan penduduk pendatang: Menjadi fokus pemerintah desa untuk menjaga ketertiban administrasi dan mengantisipasi masalah sosial lingkungan.
- Perubahan data kependudukan daring: Menimbulkan kendala dalam pengawasan penduduk nonpermanen karena minimnya pelibatan pemerintah desa.
- Hambatan bantuan pendidikan: Belum optimalnya pencairan bantuan akibat kendala administratif pada aktivasi rekening dan sinkronisasi antarinstansi.



## Pertahanan dan Keamanan

- Gangguan keamanan dan potensi konflik sosial masih menjadi perhatian masyarakat karena dapat memengaruhi stabilitas sosial dan aktivitas masyarakat di daerah.



## Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah

- Dorongan pemekaran wilayah Mangoli di tengah moratorium DOB perlu diiringi kesiapan ekonomi, fiskal, dan sarana prasarana agar tidak menambah ketergantungan pada dana transfer pusat.



## Wilayah Perbatasan Negara

- Kerusakan jalan perbatasan Kalimantan Barat menghambat mobilitas, distribusi barang, dan layanan dasar.
- Potensi ekspor sagu Kepulauan Meranti belum dikelola maksimal untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- Keterbatasan dermaga desa menghambat konektivitas antarwilayah dan kelancaran distribusi hasil bumi.



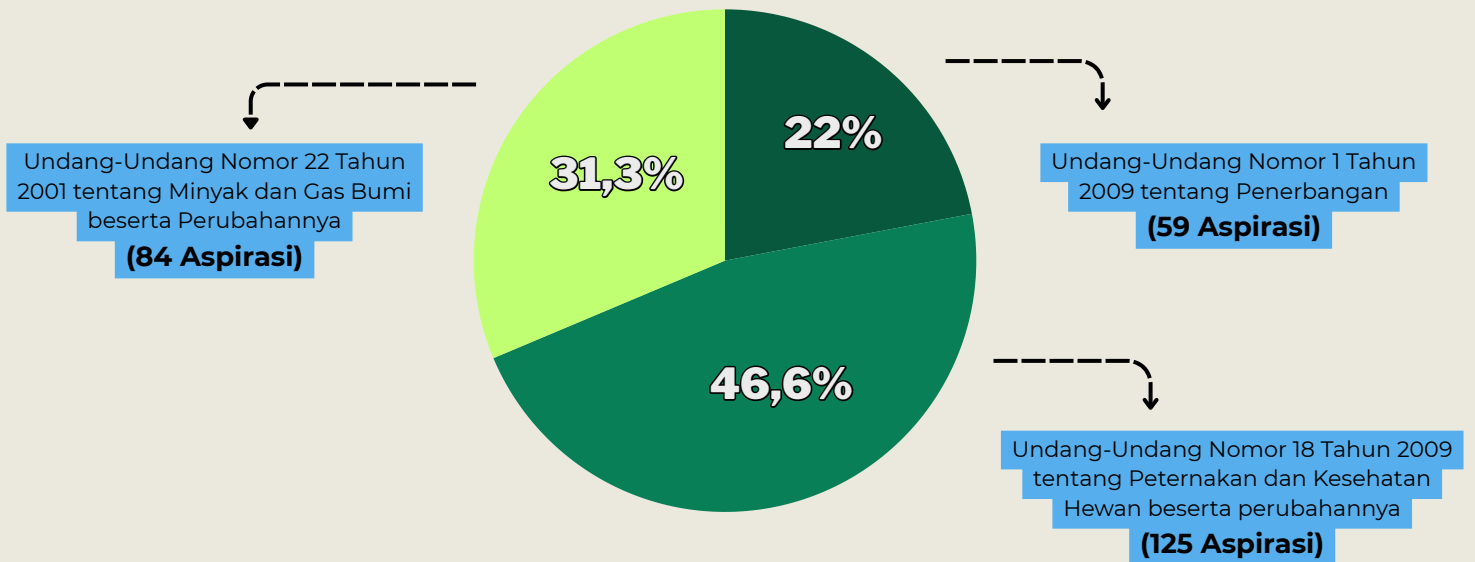
## Hubungan Daerah Dengan Luar Negeri

- Limbah sabut kelapa di Rangsang belum dikelola maksimal menjadi produk ekspor bernilai ekonomi.
- Keterbatasan personel dan pengawasan imigrasi di Sumatera Utara menghambat pencegahan pekerja migran ilegal.

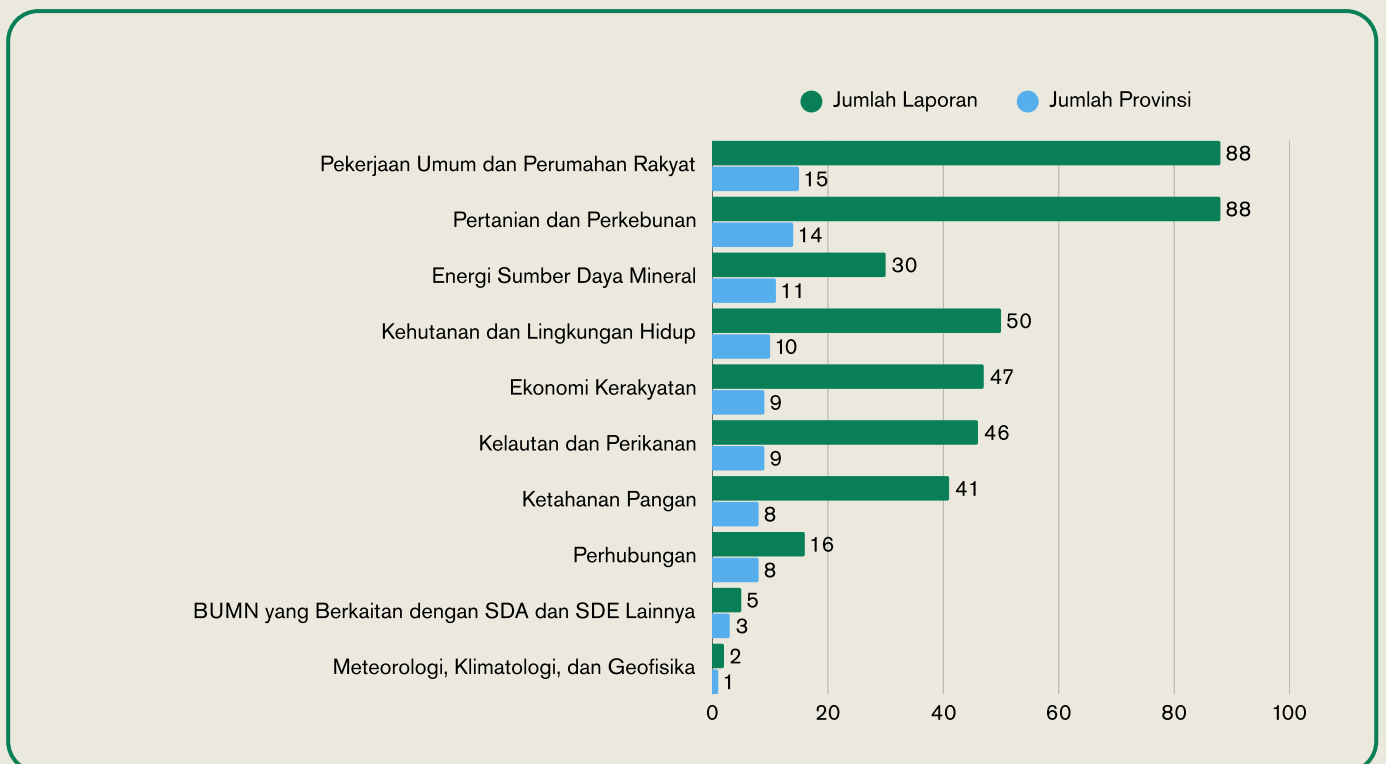


# ASPIRASI KOMITE II

*Prosentase Aspirasi Berdasarkan Tema Agenda*



*Jumlah Provinsi dan Jumlah Aspirasi Berdasarkan Bidang Tugas Lainnya*





# ISU STRATEGIS BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS

1

## Inventarisasi Materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta Perubahannya



- Tingginya Biaya Produksi dan Lemahnya Perlindungan Peternak
- Ancaman Penyakit Hewan dan Keterbatasan Layanan Kesehatan Veteriner
- Infrastruktur, Teknologi, dan Produktivitas Peternakan Masih Rendah
- Pengawasan Keamanan Pangan dan Implementasi Regulasi

2

## Inventarisasi Materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta Perubahannya

- Distribusi dan Pengawasan BBM/LPG Bersubsidi
- Kenaikan Harga Energi dan Dampak Ekonomi
- Ketimpangan Manfaat Migas dan Peran Daerah
- Infrastruktur Energi dan Ketahanan Energi Nasional





# ISU STRATEGIS BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS

3

## Inventarisasi Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan



- Tingginya Harga Tiket Pesawat dan Beban Biaya Avtur
- Keterbatasan Infrastruktur dan Kapasitas Bandar Udara
- Konektivitas Udara dan Ketimpangan Pelayanan Penerbangan
- Pengawasan Keselamatan dan Evaluasi Implementasi UU Penerbangan



# BIDANG TUGAS LAINNYA KOMITE II



## Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Jalan Rusak dan Konektivitas Wilayah yang Belum Memadai
- Kesulitan akses air bersih dan layanan dasar masyarakat
- Lemahnya Perlindungan Permukiman dari Risiko Bencana
- Layanan Publik Dasar dan Penataan Fasilitas Umum yang Belum Optimal



## Bidang Pertanian dan Perkebunan

- Keterbatasan Pupuk, Bibit, dan Sarana Produksi Pertanian
- Infrastruktur Pertanian Belum Memadai
- Lemahnya Perlindungan Permukiman dari Risiko Bencana



## Bidang Energi Sumber Daya Alam

- Tata Kelola SDA dan Perlindungan Masyarakat Terdampak
- Keterbatasan Akses Listrik dan Energi Desa



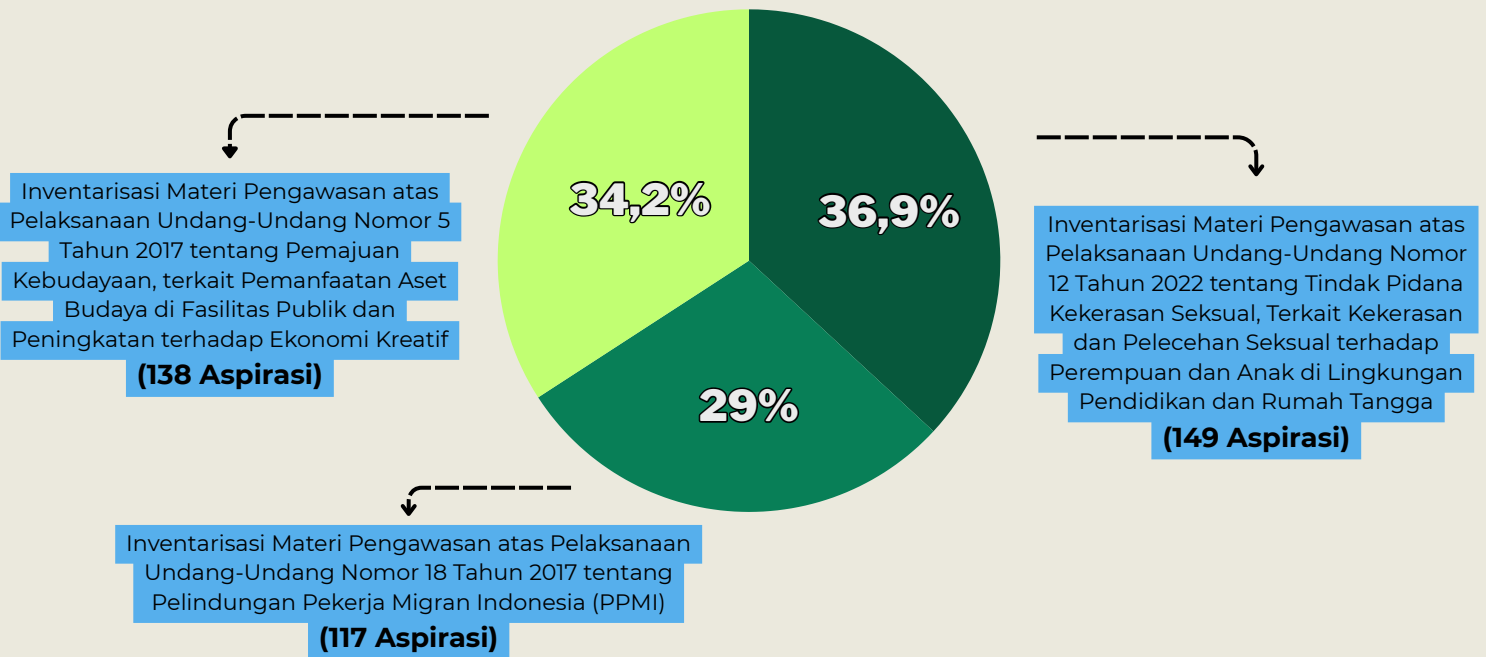
## Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- Pengelolaan Sampah Belum Optimal
- Konflik Kawasan Hutan dan Ruang Hidup Masyarakat
- Kerusakan Lingkungan akibat Industri dan Pertambangan
- Mitigasi Bencana dan Konservasi Lingkungan

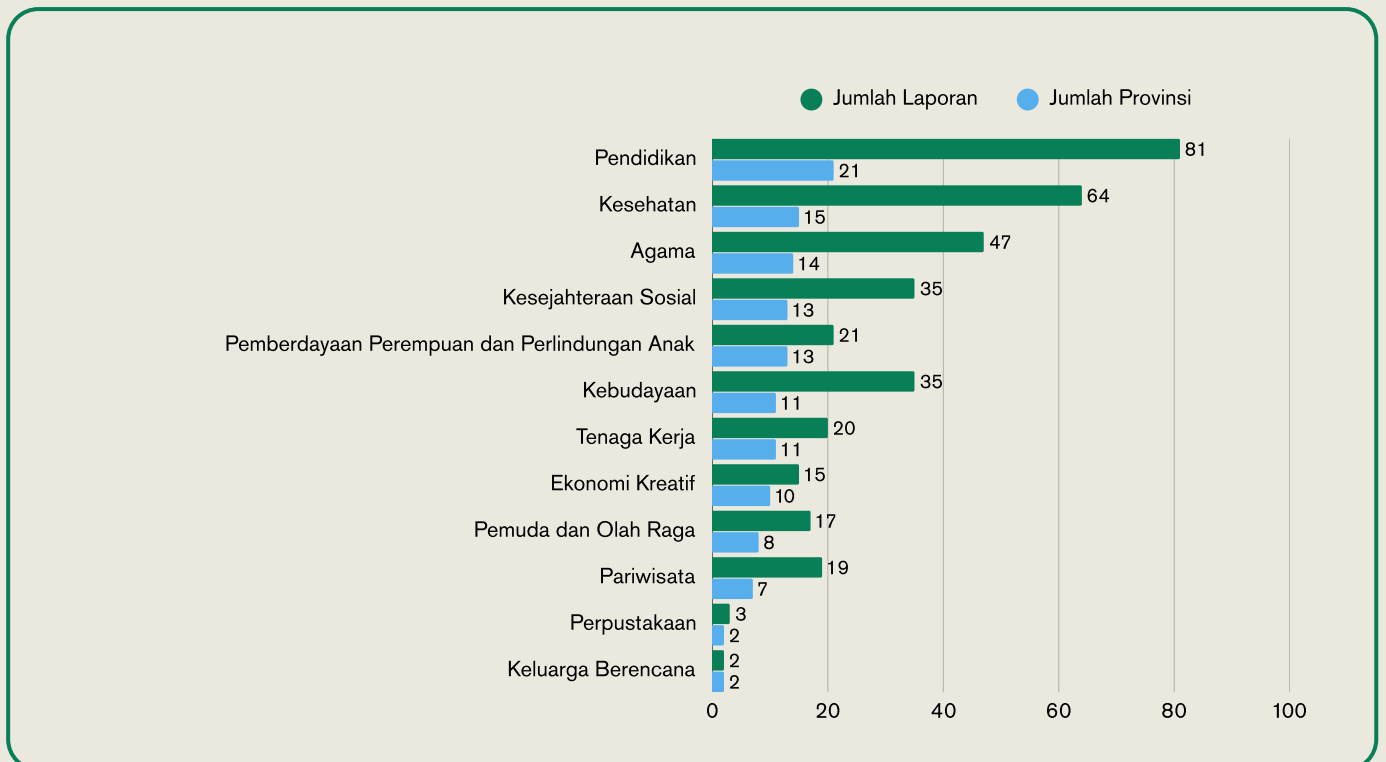


# ASPIRASI KOMITE III

Prosentase Aspirasi Berdasarkan Tema Agenda



Jumlah Provinsi dan Jumlah Aspirasi Berdasarkan Bidang Tugas Lainnya





# ISU STRATEGIS BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS

1

## Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)



- Masih banyak PMI berangkat melalui jalur nonprosedural dan pengawasan terhadap calo, agen ilegal, dan LPK bermasalah masih lemah.
- Kualitas keterampilan, kemampuan bahasa asing, dan sertifikasi calon PMI masih rendah akibat keterbatasan BLK, instruktur, dan fasilitas pelatihan yang belum sesuai kebutuhan pasar global.

2

## Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Terkait Kekerasan dan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan dan Rumah Tangga

- Banyak daerah masih kekurangan tenaga profesional seperti psikolog klinis, pekerja sosial, dan paralegal pada UPTD PPA. Ketersediaan rumah aman dan layanan rehabilitasi juga belum merata. Selain itu, biaya visum fisik dan psikiatrikum masih menjadi beban korban karena belum sepenuhnya terintegrasi dalam skema JKN.
- Praktik penyelesaian kasus secara informal masih terjadi karena kekerasan seksual dianggap sebagai aib keluarga. Di lingkungan pendidikan, banyak sekolah belum memiliki SOP, kanal pengaduan aman, dan satgas perlindungan yang berjalan efektif.





# ISU STRATEGIS BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS

3

**Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terkait Pemanfaatan Aset Budaya di Fasilitas Publik dan Peningkatan terhadap Ekonomi Kreatif**



- Pemanfaatan aset budaya di ruang publik belum optimal dalam menonjolkan identitas lokal, sementara para pelaku seni terhambat oleh tingginya tarif sewa fasilitas publik milik pemerintah. Kondisi ini diperburuk dengan banyaknya situs cagar budaya yang terbengkalai akibat ketiadaan tenaga juru pelihara (Jupel) serta minimnya alokasi anggaran pemeliharaan rutin.

- Pelaku ekonomi kreatif menghadapi hambatan serius dalam pemasaran produk kriya dan kuliner tradisional karena kurangnya inovasi desain serta rendahnya literasi pemasaran digital. Selain itu, terdapat kerentanan plagiarisme terhadap karya budaya karena banyak motif tradisional dan pengetahuan adat yang belum terdaftar dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI)





# BIDANG TUGAS LAINNYA KOMITE III



## Kesehatan

- Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi balita di Posyandu masih terkendala kuota dan distribusi penerima. Standar menu gizi dinilai belum sesuai dengan kebutuhan balita di daerah.
- Wiayah 3T masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan tetap, terutama dokter spesialis.



## Agama

- Masyarakat mengeluhkan panjangnya waiting list haji, belum transparannya sistem antrean, serta kualitas layanan jamaah yang masih belum optimal, khususnya bagi lansia.
- Masih terdapat keterbatasan dukungan terhadap pembinaan keagamaan, penguatan toleransi, dan pendidikan karakter masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah dengan tingkat keragaman tinggi.



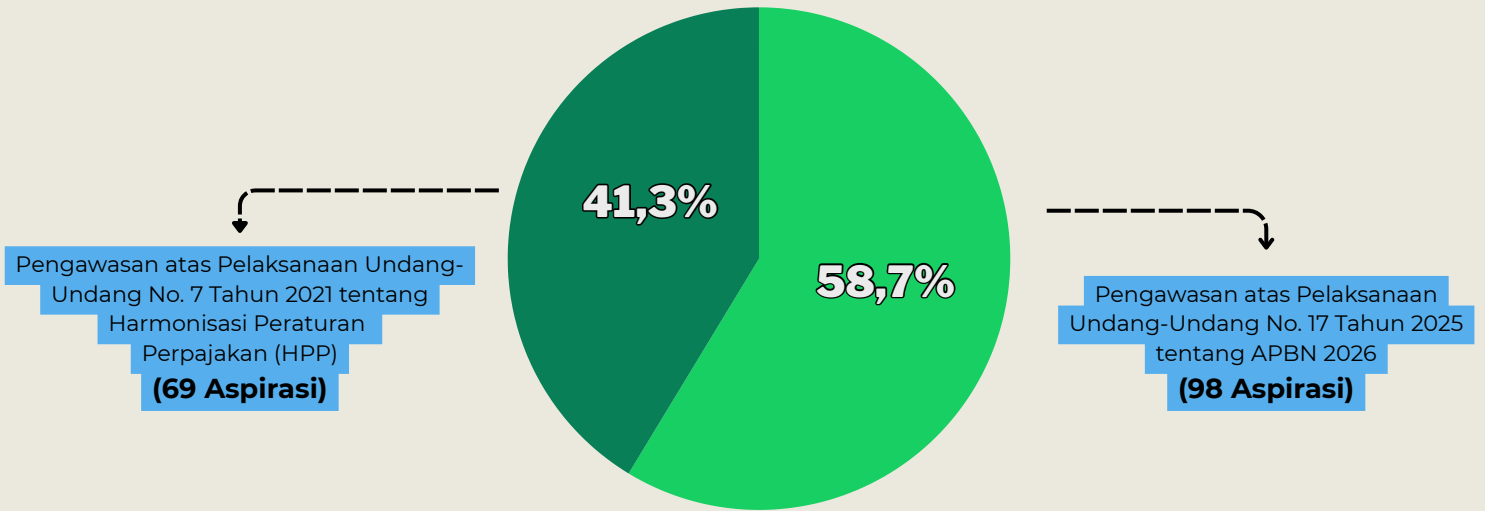
## Pendidikan

- Tingkat kesejahteraan guru honorer (SD, TK, PAUD) masih rendah dan diperparah oleh kekhawatiran penghentian status honorer tahun 2027.
- Penyaluran PIP dan KIP Kuliah terhambat oleh ketidaksinkronan data Dapodik, NIK, dan NISN, terutama di wilayah dengan akses internet terbatas.

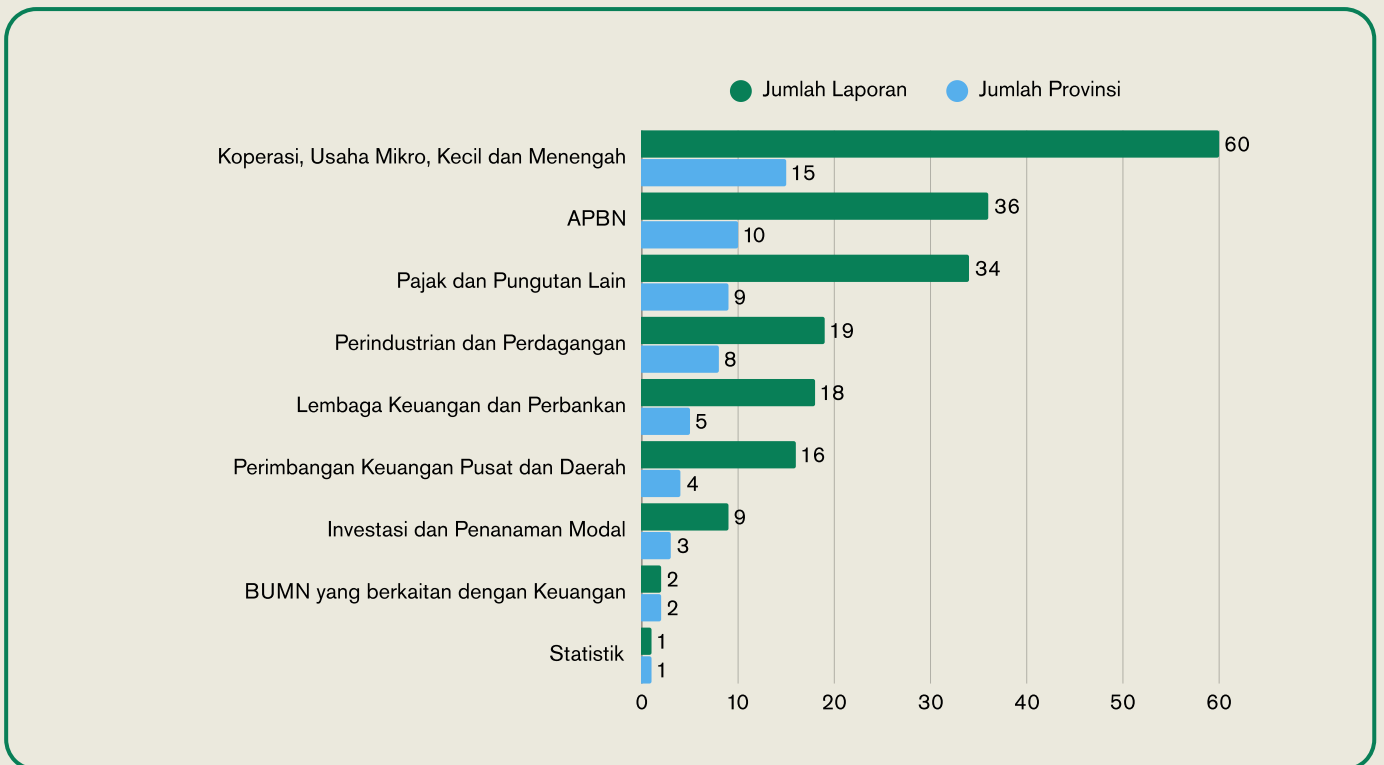


# ASPIRASI KOMITE IV

*Prosentase Aspirasi Berdasarkan Tema Agenda*



## *Jumlah Provinsi dan Jumlah Aspirasi Berdasarkan Bidang Tugas Lainnya*





# ISU STRATEGIS BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS

1

## Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026



- Ketergantungan daerah terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH)
- Belum optimalnya kualitas belanja daerah dan penyerapan anggaran
- Fluktuasi PNPB dan ketergantungan pada komoditas SDA
- Rendahnya kapasitas fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Perlunya diversifikasi sumber penerimaan negara dan penguatan ekonomi daerah

2

## Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

- Optimalisasi implementasi coretax dan digitalisasi administrasi perpajakan.
- Kekhawatiran dampak kenaikan PPN terhadap daya beli dan industri lokal.
- Kesiapan implementasi pajak karbon dan pengelolaan data emisi industri.
- Perluasan basis pajak dan formalisasi sektor informal.
- Kepatuhan Wajib Pajak Dan Literasi Perpajakan Masyarakat Masih Rendah





# BIDANG TUGAS LAINNYA KOMITE IV



## Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- Implementasi program koperasi di Kalimantan Tengah belum berjalan optimal karena terkendala masalah pengadaan lahan, ketidaksesuaian realisasi anggaran, serta kurangnya transparansi, pengawasan, dan pelibatan perangkat desa dalam pemanfaatan dana desa.
- Pelaku UMKM Jawa Timur dalam program BNI Xpora membutuhkan pendampingan teknis spesifik terkait standar sertifikasi dan regulasi negara.



## APBN

- Tingginya belanja pegawai APBD Kepri (27,72%) membatasi anggaran publik dan berisiko melanggar batas maksimal 30% pada tahun 2027.
- Warga Kampung Jawa menuntut penertiban tambang, stabilisasi harga bahan pokok, pemenuhan fasilitas nelayan, dan jaminan kelanjutan program pembangunan daerah.
- Optimalisasi peran bidan dalam pelayanan kesehatan masih terhambat oleh regulasi yang membatasi ruang gerak serta tingginya biaya sertifikasi profesi.



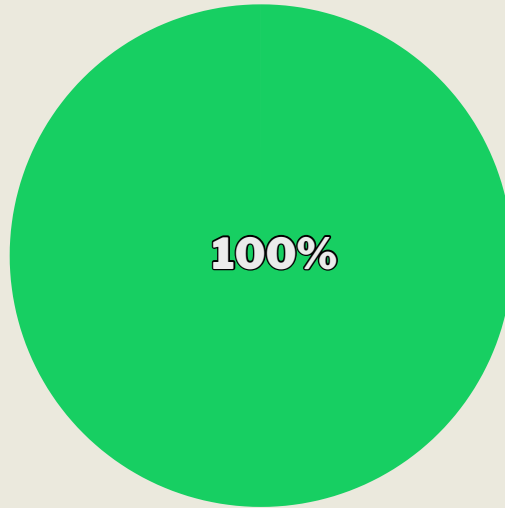
## Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

- Penurunan TKD Kepri sebesar Rp534 miliar pada APBN 2026 berdampak pada penundaan pembangunan dan pemotongan TPP, yang berakar dari ketidakadilan kebijakan pembagian DAU yang masih menjadikan luas daratan sebagai basis utama.
- Bantuan keagamaan Rp2.000.000 per KK dinilai sangat membantu, namun masyarakat berharap penyalurannya merata dan transparan, serta diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi untuk mencegah ketergantungan.



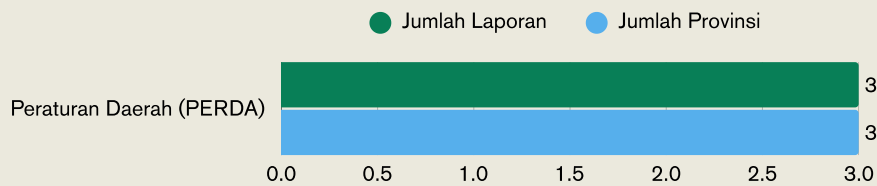
# ASPIRASI BULD

*Prosentase Aspirasi Berdasarkan Tema Agenda*



Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Penyelenggaraan Pendidikan  
**(223 Aspirasi)**

*Jumlah Provinsi dan Jumlah Aspirasi Berdasarkan Bidang Tugas Lainnya*





# ISU STRATEGIS BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS

1

## Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Penyelenggaraan Pendidikan



- Diperlukan perlindungan hukum bagi guru guna mencegah ancaman kriminalisasi saat menjalankan tugas pembinaan dan pendisiplinan siswa.
- Yayasan Pendidikan Kinasih mendesak penguatan Peraturan Daerah guna menjamin pemerataan akses pendidikan bagi kelompok rentan melalui bantuan yang komprehensif, pemerataan guru dan infrastruktur, serta dukungan digitalisasi dan data terintegrasi yang adaptif terhadap geografis Kalimantan Barat.



# BIDANG TUGAS LAINNYA BULD



## Peraturan Daerah (PERDA)

- Tumpang tindih regulasi dan lambatnya birokrasi menghambat penyelenggaraan pendidikan serta perlindungan sekolah terpencil.
- Minimnya ketersediaan sekolah negeri di Dukuh Kupang membuat sistem zonasi pendidikan tidak efektif.
- Pelimpahan kewenangan jenjang pendidikan ke provinsi memicu sikap lepas tangan pemerintah kabupaten/kota.



# Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah

Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2025-2026  
(24 April - 13 Mei 2026)

